

PENERAPAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DIBADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

Karina Oktavia*

Maslichah**

Dwiyani Sudaryanti***

Email : karinaokta4@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan SAP di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam penyajian laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur telah menerapkan basis akrual sepenuhnya atau masih menggunakan basis kas menuju akrual. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diterapkan dalam penyajian posisi keuangan pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang standart Akuntansi Berbasis Akrual dan juga masih menerapkan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual, simpulan ini didukung dengan adanya wawancara antara peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Penata Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak diturunkannya PP 71 Tahun 2010 pada tahun 2015 baru dimulai dengan keseluruhan dikarenakan dilakukannya pelatihan selama 5 tahun. Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain antara lain terkait dengan penguasaan teknologi informasi sehingga perlu pelatihan atau seminar bagi para pegawai seperti pada bagian/staff keuangan agar kedepannya hambatan dapat diminimalisir melalui peningkatan kemampuan kerja para staff di Badan Lingkungan Hidup

Keywords: PP 71 Tahun 2010 , SAP Basis Akrual

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the East Java Environmental Agency has implemented SAP in financial reporting, the East Java Environmental Protection Agency has fully implemented accruals or is still using cash accruals. This type of research is a type of qualitative research, this research was conducted by taking the object of the Accrual Government Accounting Standard Statement applied in the presentation of financial position to the Office of the Environmental Protection Agency of East Java. According to the research results, in the financial statements of the Environmental Protection Agency of East Java Province, Government Regulation Number 71 of 2010 concerning accrual accounting standards has been implemented, and continues to apply cash basis in accrual accounting. This finding is supported by interviews between researchers. and the Head of Accrual Accounting and Financial Reporting of the East Java Provincial Environmental Agency who stated that the East Java Province Environmental Protection Agency has implemented the SAP accrual basis since the enactment of PP 71/2010. In 2015 it was only

started entirely thanks to 5 years of training ... Obstacles in implementing Government Regulation Number 71 of 2010 concerning State Accounting Standards, among others, are related to the mastery of information technology, so it is necessary to have training or seminars for employees such as financial staff so that obstacles to the future can be minimized by increasing the performance of employees at the Environmental Agency.

Keywords: PP 71, 2010, SAP accrual method.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan cara melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan standar akuntansi akrual, laporan keuangan harus mengandung informasi yang terkait pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dengan basis akrual untuk pelaporan finansial, serta mengakui pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam pelaporan anggaran menggunakan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/ APBD). KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Lingkungan Hidup pemerintahan Jawa Timur apa sudah menggunakan basis akrual untuk keseluruhan proses akuntansinya atau masih menggunakan basis kas menuju akrual. Hal ini dapat menimbulkan kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP baru adanya kelebihan dan kekurangan serta peluang dan tantangan dalam penerapan basis ini sehingga perlu dibuat kajian terhadap berbagai macam perubahan SAP, baik SAP yang lama ataupun SAP yang baru serta perlu adanya pengkajian terhadap berbagai macam perspektif dari penerapan SAP yang telah diundangkan tersebut sehingga diharapkan mampu menjadi pandangan bagi para satuan kerja pemerintahan untuk menerapkan SAP dengan basis akrual secara penuh. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai juga akan menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku penata laporan keuangan basis akrual, bahwa dalam penyajian laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menyajikan komponen laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional dan Neraca.

Perumusan masalah merupakan hal yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Laporan Keuangan merupakan salah satu hal paling penting untuk diperhatikan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada suatu instansi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Lingkungan Hidup dalam penyajian laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur apakah telah menerapkan basis akrual sepenuhnya atau masih menerapkan basis kas menuju akrual”

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) yang berisi tentang standar akuntansi pemerintah baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah. Dapat dikatakan juga peraturan tersebut merupakan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Menurut Wijaya (2008), standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sementara akuntansi berbasis akrual atau basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), adalah adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan”. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya di konsumsi. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah banyak dilakukan, namun fokus penelitian tentang kendala dalam penerapan basis akrual pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih terbatas.

Sampel (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Alexander (2015) melakukan penelitian ber judul “ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung” . Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan Pemerintah Kota Bitung berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaL. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward AcruaL) dan/atau Berbasis Kas Menuju AkruaL.

Firdaus (2015) melakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Penerapan Pp No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL: Studi Kasus di Pemda Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 berbasis akruaL. Dalam menyusun LKPD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akruaL (Lampiran II PP 71/2010). Dan perlakuan akuntansi pada LKPD Kab. Nganjuk terkait penerapan PP 71/2010 basis akruaL telah sesuai untuk pengakuan, penilaian dan penyajian pos-pos dalam neraca, kecuali pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai piutang sebesar nilai nominal, melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan

Paula (2016) yang berjudul tentang Penyajian Laporan keuangan Daerah Sesuai Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan dalam tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 serta masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Lamonisi (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon”. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL.

Berdasarkan paparan di atas maka dikemukakan beberapa pertanyaan peneltitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAP di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaL di Badan Lingkungan Hidup dalam penyajian laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup jawa timur apakah telah menerapkan basis akruaL sepenuhnya atau masih menerapkan basis kas menuju akruaL ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah”.

Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

Adapun jenis-jenis data dalam penelitian untuk memudahkan peneliti menganalisis pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah Data Kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian masih berupa data-verbal dan keterangan. Seperti sejarah instansi, struktur organisasi dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi, *interview* dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009)

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan: penarikan/ verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Akuntansi keuangan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan di kantor Badan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur.

Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bertugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dengan dua informan, yaitu Bapak Bambang selaku penata laporan keuangan berbasis akrual dan Bu Yuli selaku kepala keuangan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Manfaat yang di dapatkan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup dengan diterapkannya SAP berbasis akrual menjadikan laporan keuangan menjadi lebih informatif. Tetapi menurut Bapak Bambang manfaat dari penerapan SAP Akrual ada juga yang lain yaitu dapat membuat pencatatan yang lebih rapi, dapat lebih mengetahui potensi dari piutang dan pencatatan atas barang lebih rapi. Selain banyaknya manfaat yang didapatkan ada juga kendala yang dialami oleh Bapak Bambang dan juga Bu Yuli dalam penerapan SAP Akrual.

Mereka berpendapat bahwa kendala yang dialami itu berasal dari SDM nya yang diperlukan latihan lebih lagi pada saat awal diterapkannya SAP Akrual, karena ini merupakan hal baru yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kendala lain yang terkait masalah system aplikasi yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan. Adanya pergantian SAP maka aplikasinya pun diganti sesuai kebutuhan yang diperlukan, karena akan dilakukan pengupragedan pada aplikasi maka terkadang mengalami trouble pada system aplikasinya. Masalah system aplikasi yang suka trouble ini akan menghambat proses pencatatan transaksi.

Untuk menangani kendala yang ada Bu Yuli mengatakan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup memberikan laptop untuk pembelajaran aplikasi yang nantinya digunakan untuk pembuatan laporan keuangan di Kantor Badan Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur. Keberhasilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sendiri, Bapak Bambang berkata untuk strategi yang digunakan adalah sering mengadakan pelatihan terhadap perubahan SAP Akrual terkait system aplikasi yang baru. Ditambahkan pula oleh Bu Yuli yang mengatakan bahwa keberhasilan penerapan SAP Akrual adalah dengan adanya komitmen yang baik dari pimpinan.

Penerapan SAP Akrual dilaksanakan sebagai wujud kepatuhan kepada peraturan dengan mengikuti format dan alurnya. Strategi dilakukan dalam rangka implementasi SAP Akrual pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan penetapan implementasi SAP Akrual.

Di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pengakuan memiliki arti sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Sedangkan pengukuran memiliki arti sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi yang melengkapi unsur pendapatan LRA dan pendapatan LO, aset, kewajiban, ekuitas, belanja, dan beban yang akan termuat pada laporan keuangan pada kantor Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur. Dan untuk pengukuran peneliti akan menjelaskan informasi yang didapatkan melalui dua informan mengenai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Kantor Badan lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan 3 jenis laporan pokok yang disusun oleh pemerintahan provinsi Jawa Timur yang dimana Kantor Badan Lingkungan Hidup telah menerapkan aturan dari PERGUB No 002 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Jenis laporan Pelaksanaan Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

2. Laporan Finansial

Perbedaan basis pencatatan antara Laporan Finansial dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbeda mulai dari proses penjualan, posting ke buku besar sampai dengan proses laporan. Laporan Finansial sendiri terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka dan analisi atas informasi dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan informasi tambahan lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkap serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Bapak Bambang dan Bu Yuli menambahkan bahwa menurut PERGUB No 002 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup yang merujuk pada Kebijakan Akuntansi. Dimana Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. Penggunaan basis akrual ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dalam pelaporan keuangan utamanya kepada pihak ketiga. Namun demikian, SAP juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi tetap diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan SKPD digabungkan dengan laporan keuangan SKPKD dengan mengacu pada SAP. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 (dua) basis yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis akrual.

Upaya peralihan dari basis kas dan basis akrual serta menjalankan kedua basis tersebut dalam proses pelaporan keuangan bukan hal yang mudah. Perlu dilakukan pentahapan yang memungkinkan Kantor Badan Lingkungan Hidup untuk bisa menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual namun tidak mengganggu proses bisnis yang telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, diperlukan beberapa metode yang harus dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I pada masa transisi.

Penyajian Laporan Keuangan menggunakan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) menuntut perlunya konversi Laporan Keuangan. Konversi digunakan karena keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur didasarkan atas anggaran dan pelaksanaan anggaran. Anggaran dan pelaksanaan anggaran selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta revisinya.

Pelaksanaan anggaran yang mengacu pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah akan menghasilkan sisten informasi yang sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006. Oleh karena itu, LRA yang dihasilkan juga mengacu pada format yang digariskan dalam Permendagri No 13 tahun 2016. Perbedaan struktur laporan terutama pada Laporan Realisasi Anggaran antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut perlunya konversi Laporan Realisasi Anggaran. Konversi dilakukan setiap penyusunan laporan keuangan, baik laporan semesteran maupun tahunan. Konversi LRA dilakukan dilevel kode rekening kelompok.

LRA versi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pendapatan, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Perbedaan utama antara LRA versi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP ada pada akun Pendapatan dan Belanja. Konversi dilakukan untuk Akun Pendapatan dan Belanja, sedangkan untuk Pembiayaan tidak dilakukan konversi mengingat struktur pembiayaan menurut SAP sama dengan struktur pembiayaan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Jadi, BPKAD selaku PPKD melakukan konversi untuk akun Pendapatan dan Belanja, sedangkan SKPD melakukan konversi untuk akun Belanja saja karena struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terjadi perbedaan antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang standart Akuntansi Berbasis Akrual dan juga masih menerapkan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual, simpulan ini didukung dengan adanya wawancara antara peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Penata Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak diturunkannya PP 71 Tahun 2010 pada tahun 2015 baru dimulai dengan keseluruhan dikarenakan dilakukannya pelatihan selama 5 tahun.

Perlakuan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 terkait penerapan PP No 71 Tahun 2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca.

Saran peneliti sehubungan dengan hasil dari penelitian ini yaitu Berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan cara gencar memberikan sosialisai disertai pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama

yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar implementasi SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal. Dan sistem serta sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar kesalahan terkait sistem dan aplikasi yang menunjang pelaporan bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Sari. 2014. *Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang* (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran).
- Ratmono, Dwi dan Sholihin, Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cet. Pertama. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sampel. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual*.
- Yabbar, Rahman dan Hamzah, Ardi. 2015. *Konsep dan Aplikasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Penerbit Pustaka. Surabaya.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halim, Abdul., Muhammad, Syam, Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba. Jakarta.

*) Karina Oktavia adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

***) Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

****) Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.